

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

DANDY PUTRA REFZI
1810113055

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)

Pembimbing :

Didi Nazmi, S.H., M.H
Delfina Gusman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2021**

ABSTRAK

Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah pada sistem pemerintahannya. Penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan serta memperhatikan potensi daerah tersebut. Dengan berlakunya sebuah otonomi daerah tentu Walikota/Bupati yang memiliki posisi dan kewenang tertinggi untuk mengeluarkan kebijakan dan salah satunya ialah kebijakan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut sebagai APBD). Terdapatnya sebuah keleluasaan yang dapat dilakukan oleh seorang Bupati Kabupaten Tanah Datar oleh karena tersebut tentu dibutuhkan peran pihak lain untuk dapat mengontrol dan mengawasi dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai DPRD) Kabupaten Tanah Datar. DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini hanya memiliki wewenang terkait mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar 2021; *Kedua*, Bagaimana konsep yang ideal dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah metode yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai bagaimana implementasi dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar. Data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung kepada Dua Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peneliti menilai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam mengawasi Bupati Kabupaten Tanah Datar telah berjalan dengan baik. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar ialah dengan cara pengawasan secara langsung. Adapun yang kedua yakni konsep yang ideal terkait pengawasan DPRD untuk mengawasi pemerintah daerah ialah dilakukan dengan cara pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan dengan jangka waktu atau biasa disebut dengan pengawasan *a-priori* dan pengawasan *a-posteriori* diiringi dengan pengawasan yang dilakukan tata cara pengawasan refleksi yakni pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlu adanya penyempurnaan konsep guna untuk terus memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh DPRD kepada seorang Kepala Daerah.